

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Draf APBD DKI 2018 Disoal

Salah Satunya Terkait TGUPP

JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Dalam proses evaluasi yang direncanakan berlangsung selama dua pekan itu, sejumlah mata anggaran yang menjadi perhatian publik terus disorot.

"Sudah kami terima draf APBD-nya. Saat ini sedang kami lihat ke dalamnya, item-item yang jadi sorotan publik seperti anggaran hibah dan juga Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan menjadi perhatian kami," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, Senin (4/12).

Sumarsono mengatakan, target pendapatan APBD juga akan dilihat. Itu untuk memastikan pendapatan yang diterima Pemprov DKI Jakarta berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum. Sumber pendapatan juga harus memiliki dasar hukum. Kemudian, Kemendagri juga akan meninjau pos-pos anggaran yang dinilai tidak logis dan pemborosan. Pihaknya sudah memberi arahan agar belanja dianggarkan untuk masalah banjir dan kemacetan menjadi prioritas.

"Beberapa waktu lalu Mendagri kan sudah arahkan supaya fokus pada banjir dan kemacetan," terang dia.

Lebih lanjut, ungkap Sumarsono, Kemendagri akan melakukan evaluasi selama dua pekan. Hal yang akan dilihat adalah sinergi antara dokumen perencanaan dan anggarannya. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

"RPJMD dan RKPD itu dengan dokumen anggaran, kami lihat konsistensinya," tutur dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang APBD DKI 2018 telah disahkan. Dia meyakini proses evaluasi di Kemendagri juga berjalan lancar. Terlebih, dalam proses penyusunan APBD tersebut masyarakat telah ikut andil "memelototi" rancangan anggaran sebelum disahkan.

Anies mengaku banyak menerima masukan dari sejak menjabat sebagai gubernur dan pembahasan rancangan anggaran. "Mudah-mudahan semua lancar," ucap dia.

Terpisah, Direktur Indonesia for Transparency and Akuntability (Infra) Agus Chaerudin, meminta Kemendagri tidak sewenang-wenang dalam melakukan proses evaluasi terhadap APBD DKI Jakarta 2018. Mata anggaran yang sudah dituliskan dalam APBD dan merupakan program Gubernur Anies dan Wagub Sandi diharapkan tidak ditak-atik lagi. "Biarkan Gubernur Anies menjalankan programnya, Kemendagri sebaiknya sebatas mengawasi saja dan tidak harus sampai merevisi APBD tersebut," kata Agus.

Lebih jauh, Agus juga mengingatkan Kemendagri, bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang kekhususan Ibu Kota Jakarta. Melalui Undang-Undang tersebut Pemprov DKI berhak menentukan sendiri program dalam APBD-nya tanpa berhak ditolak atau dibatalkan oleh Kemendagri. "Jadi, jika Kemendagri mau bertindak sewenang-wenang dengan membatalkan atau mencoret item anggaran dalam APBD DKI 2018, maka pemprov dapat mempersoalkannya," jelas Agus.

Seperti diketahui, APBD DKI 2018 yang

telah disahkan sebesar Rp 77,117 triliun. Pendapatan daerah dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 66 triliun. Sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 6,8 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 3,6 triliun. Belanja daerah nilainya menjadi Rp 71,1 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,9 triliun. Draf APBD DKI 2018 yang telah disahkan DPRD DKI telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri akan mengevaluasi APBD maksimal 15 hari. Direncanakan, pada 1 Januari 2018, anggaran sudah bisa digunakan. (wok)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Draf APBD DKI 2018 Disoal

1 APBD DKI 2018 yang telah disahkan sebesar Rp 77,117 triliun. Terdiri dari Pendapatan daerah dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 66 triliun dan sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 6,8 triliun serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 3,6 triliun.

2 Belanja daerah nilainya menjadi Rp 71,1 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,9 triliun.

3 Draf APBD DKI 2018 yang telah disahkan DPRD DKI telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

4 Kemendagri akan mengevaluasi APBD maksimal 15 hari.

5 Direncanakan, pada 1 Januari 2018, anggaran sudah bisa digunakan.

1 JAN 2018

APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI